



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Desember 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSTAQIM
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA
3. NHK : 712195

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/130 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 378.500.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER/SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N MAX/ SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER/MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SOLO / RG 10 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 10.000.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 231.401.986**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	1.319.901.986
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.319.901.986

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.